

BAB II

LATAR BELAKANG BERDIRINYA ABRI

2.1 Sejarah Terbentuknya ABRI

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonial Belanda. Dibentuk sebagai respons terhadap ambisi Belanda untuk kembali menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata, ABRI kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perjalanan organisasi ini dimulai dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan kemudian bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan struktur dengan standar militer internasional, sehingga kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).¹⁸

Pemerintah telah berkomitmen untuk terus menyempurnakan dan mengembangkan Tentara Kebangsaan guna menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 3 Juni 1957 oleh Presiden Soekarno. Dengan didirikannya TNI, diharapkan dapat tercipta kesatuan dan kekuatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Dalam upaya untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, pendirian TNI menjadi langkah yang strategis.

¹⁸ *Sejarah TNI, Jilid 1 (1945-1949)*. (2000). Jakarta: Markas Besar TNI Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.

TNI diharapkan dapat menjadi payung bagi seluruh komponen pertahanan negara, serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Tentara Nasional Indonesia berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional selama Perang Kemerdekaan (1945-1949). Pada saat yang kritis tersebut, TNI harus menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan politik dan militer. Rongrongan politik berasal dari golongan komunis yang ingin mempengaruhi TNI melalui "Pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat". Sementara itu, tantangan militer dari dalam negeri termasuk pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri juga menjadi ujian bagi TNI, dimana TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Perang Rakyat Semesta adalah strategi perang yang melibatkan seluruh kekuatan TNI dan masyarakat Indonesia serta sumber daya nasional untuk menghadapi agresi Belanda. Dalam kondisi keterbatasan, strategi ini digunakan untuk mempertahankan integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterlibatan rakyat dalam perang ini menunjukkan kesatuan dan kekuatan bersama untuk melawan agresi tersebut. Dengan demikian, kekuatan TNI bersama rakyat berhasil mempertahankan kedaulatan negara.

Berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir tahun 1949, Republik Indonesia Serikat (RIS) didirikan. Seiring dengan itu, Angkatan Perang RIS (APRIS) juga dibentuk, yang merupakan gabungan TNI dan KNIL

dengan TNI sebagai inti. Pada bulan Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan. APRIS kemudian berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).¹⁹

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959 mempengaruhi kehidupan TNI secara signifikan. Campur tangan politisi dalam masalah internal TNI pada saat itu telah menimbulkan dampak yang cukup besar. Salah satu contohnya adalah terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang menyebabkan terjadinya keretakan di lingkungan TNI Angkatan Darat. Di sisi lain, campur tangan politisi juga mendorong TNI untuk terlibat dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI). Partai ini bahkan ikut serta sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955. Hal ini menunjukkan bahwa campur tangan politisi pada masa itu telah memengaruhi peran TNI dalam ranah politik, baik secara internal maupun eksternal.

Periode Demokrasi Liberal, yang juga dikenal sebagai periode ini, ditandai oleh berbagai pemberontakan di dalam negeri. Pada tahun 1950, bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung yang dikenal sebagai pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Di sisi lain, terjadi Pemberontakan Andi Azis di Makassar, serta pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di wilayah Maluku. Sementara itu, DI TII Jawa Barat juga memperluas pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Tahun 1958 menjadi tahun yang signifikan dalam periode ini karena terjadinya

¹⁹ Disjarah TNI-AD. (1978). *op.cit*, hlm 60.

berbagai pemberontakan yang mengguncang stabilitas negara. Hal ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilitas di dalam negeri. Dalam konteks ini, penanganan pemberontakan menjadi salah satu fokus utama pemerintah demi memastikan kedaulatan dan kestabilan negara.²⁰

Pemberontakan yang dilakukan oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) di sebagian besar wilayah Sumatera dan Sulawesi Utara telah menimbulkan ancaman terhadap integritas nasional. Namun, berkat upaya yang gigih dan sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan kekuatan komponen bangsa lainnya, seluruh pemberontakan tersebut berhasil ditumpas. Tindakan tegas dan koordinasi yang baik antara aparat keamanan dan pemerintah telah mampu mengembalikan keamanan dan ketertiban di wilayah-wilayah yang terdampak pemberontakan. Hal ini merupakan bukti nyata kesatuan dan kekuatan bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan serta kerja sama dari seluruh elemen masyarakat yang turut berperan aktif dalam menumpas pemberontakan ini. Kejadian ini juga menjadi momentum bagi kita semua untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1962, upaya untuk menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) merupakan langkah yang penting dalam sejarah TNI pada dekade tahun

²⁰ Sejarah, P., & Tradisi, T. N. I, *op.cit.*, hlm 247 dan 266.

enam puluhan. Proses penyatuan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab dari kedua institusi tersebut. Penyatuan ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan kohesi di antara berbagai cabang militer dan kepolisian, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Langkah ini juga memberikan landasan yang kuat bagi TNI dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi kedaulatan dan keamanan Republik Indonesia.

2.2 Bhakti ABRI sebagai Cikal Bakal AMD/TMMD

Berbicara mengenai pengabdian ABRI terhadap bangsa dan negara Indonesia, berarti bukan saja berbicara mengenai aspek militer semata, sebab pengabdian ABRI terhadap bangsa dan negara Indonesia tidak lepas dari perjuangan ABRI sendiri dimasa lalu, melingkupi aspek-aspek sosial, politik, budaya serta aspek psikologi. Aspek militer dan non militer mewarnai ke khasan ABRI, yang membedakan ABRI dengan tentara lain di dunia. ABRI lahir dari kancan revolusi dan membesarkan diri sendiri melalui perjuangan antara bertempur gerilya di desa-desa serta melakukan diplomasi di meja perundingan baik dengan Jepang, Sekutu dan Belanda.

Hankamrata merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menggerakkan seluruh potensi nasional secara menyeluruh guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjamin keutuhan bangsa, serta mengamankan segala upaya dalam mencapai tujuan nasional. Melalui pendekatan yang komprehensif, Hankamrata bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan bangsa terlindungi dan terjamin, baik dari segi politik, ekonomi, sosial,

maupun pertahanan. Dengan demikian, Hankamrata bukan sekadar upaya militer semata, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat dan sektor-sektor terkait guna mencapai keamanan dan ketahanan nasional secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, Hankamrata melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi terkait, serta memerlukan keterlibatan serta kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Dengan demikian, Hankamrata menjadi landasan bagi upaya membangun ketahanan nasional yang kokoh dan terintegrasi.²¹

Azas yang dimiliki Hankamrata antara lain ketetapan hati rakyat untuk mempertahankan kedaulatan negara dan kemanunggalan ABRI dengan Rakyat. Dari pengertian dan Azas Hankamrata tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan serta landasan Hankamrata terletak pada kemanunggalan ABRI dengan Rakyat. Perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu dan masa sekarang pada hakikatnya sama, yaitu ingin hidup dengan layak bebas dari belenggu penjajahan dan belenggu kemiskinan. Oleh karena itu kemanunggalan ABRI dengan Rakyat merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya Si hankamrata merupakan salah satu persyaratan terlaksananya pembangunan nasional,

Relevan dengan hal tersebut, Presiden RI pertama yaitu Soekarno pada tahun 1962 mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 371/1962, kemudian menyusul dikeluarkannya Radiogram Men/Pangad Nomor T-1310/1963 tanggal 25 Juni 1963 dan Radiogram Nomor T-1697/1963 tanggal 15 Agustus 1963 tentang Genta

²¹ Ambar, Kolonel Caj Drs. Yusuf dan Perwita Sari, S.S., M.Hum. (2020). PERJALANAN SEJARAH TMMMD 1980 – 2017 Bersama Rakyat Mewujudkan NKRI Berdaulat dan Sejahtera. Bandung: Dinas Sejarah Angkatan Darat., hlm 24.

Revolusi, *Civic Mission* dan Dwi Fungsi ABRI yaitu sebagai alat keamanan nasional serta sebagai Golongan Karya. Dalam Radiogram Men/Pangad tersebut, ditekankan tentang landasan *Civic Mission* yaitu:

“..Pertama, *Mengabdikan kepada revolusi Indonesia dan berbakti kepada Ampera*, Kedua, *memperkokoh dan memperkuat keamanan dan pertahanan negara untuk mencapai ketahanan mental ideologis, politik, ekonomi, sosial dan militer*. Ketiga, *mendorong dan mewujudkan pembangunan materiil untuk mempertinggi kehidupan rakyat dalam mencapai kebahagiaan materiil dan spiritual*. Keempat, *melaksanakan character building dan nation building dalam rangka membentuk manusia Indonesia baru sebagai suatu bangsa yang progresif revolusioner, utuh dan kompak dari Sabang sampai Merauke..*”²²

Sedangkan jabaran teknis dari *Civic Mission*, Men/Pangad menekankan agar seluruh Panglima Kodam di seluruh Indonesia untuk melaksanakan *Civic Mission* dengan berpedoman pada: “Pertama, mengandung kebaktian, Kedua, tidak mengurangi kesempatan kerja buruh dan tani. Ketiga, berguna untuk pelaksanaan proyek pembangunan fisik dan mental termasuk *character building* dalam rangka Revolusi Indonesia. Keempat, dalam langkah-langkah usaha yang bersifat fisik supaya tidak berlandaskan asas-asas komersial. Kelima, bersifat mental termasuk *character building, culturil*, supaya berusaha mengamalkan Pancasila menjadi *living realities* dalam kehidupan nasional maupun internasional”²³

Pengalaman sejarah di atas dapat terlihat bahwa ABRI tumbuh dan berkembang dimasa mempertahankan kemerdekaan karena ada peran rakyat Indonesia, yang kurang lebih 80 persen rakyat Indonesia tinggal di desa-desa. Lahirnya pemikiran bahwa sudah selayaknya ABRI membantu rakyat di desa-desa

²² Dinas Sejarah Militer, Buku Sejarah Dokumenter, Operasi Bhakti TNI AD Dalam Pembangunan Masyarakat, Bandung, 1975, hlm. 1

²³*Ibid.*

dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan material maupun spiritual. Pemikiran tersebut tentunya menyangkut aspek spesial (ruang) dan aspek temporal (waktu) dalam kerangka ABRI membangun desa, dalam format ABRI Masuk Desa (AMD). Kemudian berkembang dalam suatu *a process of continuity and change* (proses kelangsungan dan perubahan) ke arah yang lebih baik menjadi TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa).

Menyelusuri siapa penggagas AMD kemudian menjadi TMMD dalam ranah Bhakti ABRI terhadap bangsa dan negara. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu adanya spesifikasi hubungan antara ABRI, Rakyat dan Pemerintah RI sekaligus lingkungan strategis wilayah RI yang melingkupinya, saling berhubungan baik bersifat ideologi, politik, ekonomi, sosial maupun hankam.

Catatan sejarah militer memuat beberapa sumber menyebutkan sebelum ditetapkannya program AMD/TMMD, sebelumnya sudah dirancang program pembangunan yang cepat, aman dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan yang melibatkan ABRI dalam proses pembangunan desa yaitu konsep *Civic Mission*. Dilihat dari sudut historis, bahwa ABRI dan Rakyat memiliki hubungan emosional sebagai pejuang bersenjata yang bersama-sama segenap rakyat Indonesia lainnya telah merebut, menegakkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta membela kedaulatan NKRI yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan membawa semangat untuk melaksanakan program *Civic Mission* atau Operasi Karya kemudian berkembang menjadi Operasi Bhakti, sebagaimana

yang tertuang dalam doktrin perjuangan ABRI, *Catur Dharma Eka Karma*, pada tanggal 17 sampai 22 Juli 1967 Seskoad bersama seluruh petinggi ABRI, Lembaga Pemerintah, para cendekiawan kalangan akademisi dan unsur-unsur pemuda dari kalangan Pemuda dan Pelajar serta Ikatan Sarjana Indonesia mengadakan Seminar Operasi Bhakti di Gedung "*Graha Wiyata Yudha*" Seskoad di Bandung seminar ini dihadiri juga oleh negara-negara utusan sahabat diantaranya Amerika Serikat. Hasil dari seminar ini terciptanya buku petunjuk tentang pelaksanaan Operasi Bhakti ABRI.

Operasi Karya atau Operasi Bhakti pada hakikatnya menempatkan ABRI sebagai institusi yang mewajibkan dirinya untuk mendarma bhaktikan diri di luar dari tugas pokoknya dalam bidang non militer dalam pembangunan masyarakat. Secara umum memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang dapat membantu terlaksanakan program pembangunan nasional, yang dijiwai oleh semangat gotong royong. Selain itu tujuannya yaitu untuk memperkukuh hubungan antara ABRI dengan rakyat agar tercapainya suatu kesatuan dan persatuan yang utuh antara ABRI dan rakyat. Karena luang lingkup dalam operasi bakti ini meliputi aspek kehidupan, bersifat terencana dan terarah serta dilaksanakan ditingkat nasional, regional maupun lokal.

Kiprah ABRI dalam darma baktinya ini dipertegas melalui Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 26/U/In/1967 berisi tentang Operasi Dharma Bhakti yang tidak terbatas pada satuan-satuan teknis saja, akan tetapi menggunakan kemampuan yang ada serta memanfaatkan kesatuan-kesatuan yang dimiliki oleh ABRI bagi menunjang pengembangan stabilitas politik dan ekonomi serta

menyempurnakan organ teritorial itu sendiri.²⁴ Secara teknis dalam organ teritorial tersebut baik tingkat nasional maupun regional merupakan badan tunggal yang menjadi inti kegiatan untuk memimpin dan mengkoordinir badan-badan sipil, militer dan swasta serta masyarakat dalam pembangunan.

Badan tersebut merupakan badan gabungan yang di dalamnya berisi wakil-wakil departemen terkait, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah yang diisi oleh tenaga ahli serta tersusun secara vertikal melalui kesatuan komando, kesatuan dalam perencanaan, penentuan prioritas dan pencegahan penyimpangan. Sasaran pokok dari Bhakti ABRI adalah pembangunan infrastruktur dan prasarana ekonomi (jalan, Jembatan, saluran air, dll.) dan di sektor pertanian (Pembangunan saluran waduk, irigasi, transmigrasi dan tataguna lahan pertanian).

Buku Realisasi Pembangunan Hankam dan Kekayaan ABRI yang telah dikukuhkan oleh Kep/B/367/1867 dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 1967 bahwa Bhakti ABRI adalah pemanfaatan kemampuan keahlian teknis ABRI dalam rangka pembangunan negara, dengan tidak mengabaikan kewaspadaan serta kesiapsiagaan nasional. *Civic Mission* diarahkan pada usaha untuk menunjang kegiatan Repelita baik dalam aspek spiritual maupun materiil. Sesuai dengan Lampiran Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 01/U/8/1966 tanggal 15 Agustus 1966 yang berisi tentang bahwa segenap unsur ABRI diarahkan pada tugas-tugas pembangunan masyarakat desa serta prasarana produksi dan komunikasi serta bidang transportasi. Sedangkan bidang Operasi Bhakti ditekankan pada tugas peningkatan produksi pangan, prasarana ekonomi, produksi sandang,

²⁴ *Ibid*, hlm. 22.

lapangan pekerjaan, penanggulangan bencana alam, pembangunan masyarakat desa serta usaha-usaha swasembada ABRI²⁵

Relevan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 1973 Dephankam mengeluarkan buku tentang Petunjuk Lapangan Operasi Bhakti ABRI dalam pembangunan masyarakat desa yang disahkan melalui Surat Keputusan Menhankam/Pangad Nomor Skep/B230/III/1973 tanggal 3 Maret 1973 di dalamnya berisi tentang tugas di luar dari tugas pokok kemiliteran yaitu membantu Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) baik yang bersifat lokal, regional maupun nasional dalam rangka pembinaan kewilayahan agar terciptanya ketahanan nasional. Pada tahun 1972 ditetapkannya 9 sasaran Operasi Bhakti yang meliputi: Pangan, Pembangunan Masyarakat Desa, Lapangan Pekerjaan, Transmigrasi, Sandang, Pangan, Rehabilitasi Industri, serta Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Pembangunan Prasarana.²⁶

Melihat perkembangan tentang kiprah ABRI dalam pembangunan di berbagai pelosok pedesaan di wilayah RI, mendorong Departemen Hankam pada saat Panglima ABRI di jabat oleh Jenderal TNI Panggabean tahun 1972 membuat naskah kerja yang berjudul "*Visual Momentum of The Indonesian Armed of Operasi Bhakti (Civic Mission)*". Sejalan dengan itu Mayor Jenderal Panoedjoe dalam artikel yang diterbitkan oleh majalah Hankam pada tahun 1972 yang berjudul "*The Role of the armed force of the republic of Indonesia in the National Development*". Mengatakan bahwa "*Setelah TNI melaksanakan misi perang*

²⁵ Lihat: Kep Menhanan/Pangab Nomor Kep/B/356/1968, tanggal 10 September 1968 tentang Kebijakan Umum Operasi Bhakti

²⁶ Lihat: Laporan Tahunan Sbin Ops Bhakti Hankam tahun 1972, Jakarta, 1973, hlm. 2.

haruslah dilaksanakan Operasi Bhakti". Pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa TNI itu tidak hanya menjalankan tugas perang akan tetapi TNI dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional di luar bidang kemiliteran.

Memasuki tahun 80-an, kusatupadukan antara ABRI dengan rakyat dikenal dengan istilah Manunggal. Kenyataan sejarah ini disadari oleh ABRI, sebab melupakan sejarah sama artinya dengan melupakan perjuangan dan kebesaran bangsa.²⁷ Kemanunggalan antara ABRI dengan rakyat merupakan keniscayaan sejarah yang tidak terbantahkan. Manunggal dalam arti sesungguhnya dalam kiprah merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Dikemukakan dalam kebijakan publik terdiri dari keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam meraih tujuan demi kepentingan masyarakat.²⁸ Hubungan dengan teori diatas yaitu ada kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan yang akan dicapai pemerintah yaitu dengan melakukan program pembangunan nasional yang beriringan dengan ABRI Masuk Desa, ABRI diikuti sertakan dikarenakan jumlah pasukan yang tersebar di seluruh Indonesia yang akan memudahkan program tersebut tercapai.

2.3 ABRI Masuk Desa (AMD)

Lahirnya ABRI masuk desa bermula dari kemanunggalan TNI-Rakyat yang menjadi kalimat baku yang penuh makna dan kearifan nasional yang kelak akan menjadikan pesan moral melampaui lintas generasi ABRI sesudahnya. Presiden Ke-2 Suharto, pada Upacara sertijab Menhankam/Pangab bulan April 1978,

²⁷ Departemen Penerangan RI, *loc.cit*, hlm. 13.

²⁸ Indiahono, D. (2009). *Op.cit*, hlm. 40.

memerintahkan kepada TNI-ABRI agar meningkatkan kemanunggalan ABRI dengan rakyat sebagai syarat utama untuk mencapai kesuksesan bersama dalam pembangunan nasional.²⁹

Pada tanggal 5 Oktober 1978 dalam Upacara HUT ABRI Ke-33 kembali Presiden Soeharto menyampaikan mengenai Kemanunggalan TNI dengan Rakyat. Menyikapi amanat tersebut Kasad Jenderal TNI R. Widodo pada hari Infantri ke-33 pada tahun 1978 menyatakan bahwa: “..*Sumber kekuatan tradisional prajurit, baik fisik maupun mental adalah doa restu dan dukungan Rakyat/Bangsa Indonesia yang kini dikenal dengan istilah Kemanunggalan ABRI dengan Rakyat..*”.³⁰ Angkatan darat harus menjadi perekat yang kuat dalam mewujudkan kekompakan seluruh rakyat termasuk ABRI perlu lebih ditingkatkan sampai eselon terbawah demi tercapainya cita-cita.³¹

Rapat pimpinan ABRI pada tanggal 26 Maret 1979 di Dilli Timor Timur (yang sekarang menjadi negara Timor Leste) Menhankam Pangab Jenderal TNI M. Yusuf mencanangkan Program ABRI Masuk Desa. Program tersebut merupakan salah satu dari tujuan Bhakti ABRI dimasa damai dalam rangka untuk menyukseskan pembangunan dan untuk kesejahteraan rakyat. Setahun kemudian pada rapat yang dilaksanakan di Pekanbaru, Presiden Soeharto menyampaikan amanat “*ABRI harus berbuat untuk kepentingan yang paling baik bagi rakyat*”.³² Perjuangan ABRI dibutuhkan karena rakyat menginginkan kelanjutan dan

²⁹ Mabes TNI-Pusjarah TNI, Sejarah TNI, Jilid IV 1966-1983, Jakarta, 2000, hlm, 192.

³⁰ Mabesad, Staf Teritorial, Beberapa Pendapat dan Gagasan Tentang Masalah Teritorial, jil (5), Jakarta, hlm, 17.

³¹ Disjarahad, Profil Kasad ke-1 s.d ke-26, Bandung, 2011, hal. 95. (Amanat disampaikan pada tanggal 13 Juni 1978).

³² Mabes TNI-Pusjarah TNI, *loc.cit.*

kelancaran dalam pembangunan, di samping itu mengerahkan anggota-anggotanya yang terbaik untuk melaksanakan tugas di luar kemiliteran yaitu TNI manunggal dengan rakyat.

Pimpinan ABRI sebagai tindak lanjut untuk merealisasikan Kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka untuk menyukseskan pembangunan nasional, mengambil langkah yang konstruktif dan aplikatif dalam kemanunggalan ABRI dengan rakyat. Menteri Hankam pada saat itu menyimpulkan empat permasalahan dasar dan tiga kerangka pokok kebijaksanaan. Empat dasar permasalahan tersebut: Pertama: *Konkretisasi kemanunggalan TNI/ABRI-Rakyat*. Kedua: *Perwujudan sistem hubungan TNI-ABRI politik dalam rangka menjamin penegakan yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945*. Ketiga: *Mengembangkan kekuatan Pertahanan Negara dengan Sistem Perlawanan Rakyat Semesta*. Keempat: *Mewujudkan profesionalisme keprajuritan Indonesia yang akan datang dengan sistem nilai Sapta Marga*.³³ Berdasarkan empat permasalahan tersebut ditarik tiga kerangka kebijaksanaan sebagai berikut:

Pertama: Atas dasar Sapta Marga seluruh jajaran TNI-ABRI yakin akan kebenaran tugas pengabdian dan menyadari bahwa ia berasal dari rakyat bangsa Indonesia. Kedua: Masyarakat bangsa Indonesia tumbuh pengertian dan penghayatannya tentang kebenaran nilai-nilai normatif Sapta Marga dan memberi dukungan sepenuhnya terhadap tugas-tugas ABRI. Ketiga: Dengan dukungan sepenuhnya masyarakat bangsa tersebut dan Pemerintah yakin atas manfaat tugas TNI-ABRI, seluruh kebijaksanaan dalam bidang pertahanan Negara akan didukung oleh Anggaran Negara yang memadai.

Demi menunjang kebijaksanaan pemimpin ABRI tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: Skep/566/1980 tanggal 30 Mei 1980 tentang pembentukan panitia kerja Departemen Hankam untuk

³³ Disbintalad, *Loc.cit*, hlm. 268.

membahas tentang materi pola dasar dan pola Operasi TNI-ABRI Masuk Desa. Dan Surat Keputusan Nomor: Skep/569/V/1980 tanggal 31 Mei 1980 tentang pengesahan pola dasar dan pola operasional TNI-ABRI Masuk Desa serta buku Pedoman Bidang Kesadaran Bernegara. Pedoman Bidang Bela Negara, Pedoman Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Operasi Bhakti menjadi sebagai kegiatan yang melibatkan kekuatan dan kemampuan ABRI yang dilaksanakan untuk rakyat di pedesaan maka dari itu operasi ini digunakan operasi TNI-ABRI di desa seiring berjalannya waktu istilah tersebut berubah menjadi ABRI MASUK DESA atau disingkat AMD³⁴. Tujuan dari AMD yaitu untuk mendukung pembangunan nasional serta mengembalikan citra ABRI yang tidak baik dimasyarakat akibat peristiwa G30S.

Berdasarkan surat keputusan Menhankam No. Skep/899/IX/1980 tanggal 5 September 1980 tentang Organisasi tugas dan tanggung jawab Operasional TNI-ABRI Masuk Desa tingkat Pusat, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 1980 ditetapkannya hari mulainya ABRI Masuk Desa tahap 1.

Adapun yang menjadi dasar dan kebijakan pelaksanaan AMD adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang No.20/1982 Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penjabarannya.

³⁴ Ambar, Kolonel Caj Drs. Yusuf dan Perwita Sari, S.S., M.Hum, *Op.cit.*, hlm 35

3. Keputusan Presiden No. 7/1974 tentang Prosedur Organisasi Departemen Hankam.
4. Surat keputusan Menhankam/Pangab No. Skep/681/V/ 1978 tanggal 31 Mei 1978 tentang Bhakti ABRI.
5. Amanat Presiden RI pada Peringatan HUT ABRI Ke-35 tanggal 5 Oktober 1980.
6. Perintah Harian Menhankam/Pangab pada peringatan HUT ABRI Ke-35 Tahun 1980 yang disampaikan di Pekan Baru.
7. Surat keputusan Menhankam/Pangab No. Skep/569/V/ 1980 tanggal 31 Mei 1980 tentang Pengesahan berlakunya Pola Dasar Konkretisasi kemanunggalan TNI–ABRI dan Rakyat Dan Pola operasional TNI–ABRI Masuk Desa, beserta buku Pedoman Bidang Kesadaran Bernegara, Pedoman Kesadaran Bela Negara, dan pedoman Bidang kesejahteraan Rakyat.
8. Surat Telegram Menhankam/Pangab No. T/648/V/1980 tanggal 26 Juli 1980 tentang Penunjukan penanggung jawab Pejabat Operasional Kegiatan TNI–ABRI Masuk Desa
9. Surat keputusan Menhankam/Pangab No. Skep/899/ IX/1980 tanggal 5 September 1980 tentang Organisasi tugas dan tanggung jawab Operasional TNI–ABRI Masuk Desa di Tingkat Pusat.
10. TNI–ABRI sebagai kekuatan Sosial dan pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka memelihara dan meningkatkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat.

11. Juklak Departemen Hankam No. Juklak/II/VII/1980 tanggal 17 Juli 1980 tentang kegiatan TNI–ABRI Masuk Desa.

Secara konstitusional atau yuridis formal dalam pelaksanaan AMD sudah sangat kuat, karena kiprahnya ABRI dalam Bhakti TNI bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab instansi yang menangani³⁵. Sebab hal ini sudah tertuang dalam tujuan dan prinsip Bhakti ABRI.

Tujuan dari program ABRI Masuk Desa berkaitan dengan teori Pembangunan dan Perubahan Sosial yang berbunyi: Pembangunan adalah salah satu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan dengan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.³⁶ Oleh sebab itu teori ini digunakan dikarenakan saling berkaitan dengan pembahasan di atas.

³⁵ *Ibid.*, hlm 37.

³⁶ Siagian, S. P. (1983). *Op.cit*, hlm, 9.